

# MENILIK TANTANGAN DAN POTENSI KERJASAMA SELATAN-SELATAN DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA ERA (PASCA) COVID-19

Andi Annur Aisyah, Ardiawan, Farahdiba Rahma Bachtiar  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Email : [farahdiba.rahma@uin-alauddin.ac.id](mailto:farahdiba.rahma@uin-alauddin.ac.id)

## ABSTRAK

*Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 mempengaruhi kebijakan tiap-tiap negara dalam menghadapi situasi ketidakpastian ini. Pada dasarnya fenomena ini telah menimbulkan Effect Global bagi seluruh sektor-sektor kehidupan umat manusia terkhusus Sosial-budaya, politik, kesehatan, pendidikan, keamanan dan yang terpenting dalam pembahasan ini merupakan Ekonomi. Dinamika Ekonomi internasional di era Covid-19 secara umum dapat dikatakan mengalami penurunan yang sangat drastis hingga menyentuh titik curam dibandingkan krisis-krisis yang pernah terjadi sebelumnya. Berangkat dari kenyataan tersebut banyak kendala dan juga ketimpangan yang sangat besar atau heterogenitas yang kompleks dirasakan oleh seluruh masyarakat internasional. Artinya, ditengah ketidakpastian yang terjadi saat ini respon internasional benar-benar sangat diperlukan demi menjaga stabilitas jalannya dunia internasional. Kolaborasi antar negara-bangsa dianggap sebagai salah satu respon Internasional yang memiliki dampak positif dan cukup mampu mengatasi masalah ekonomi di berbagai belahan dunia salah satunya adalah Kerjasama Selatan-Selatan (South-south Cooperation). Untuk mengetahui hal tersebut lebih dalam, kami memperoleh data dari berbagai sumber baik berita, laporan penelitian, jurnal, dan website. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan literature review untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan besar terkait potensi dan tantangan yang akan dihasilkan dari kolaborasi internasional atau kerjasama Internasional dari segi ekonomi.*

*Keywords: Ekonomi, Pasca Covid-19, Respon Internasional, Kolaborasi Internasional, SSC (South-south Cooperation)*

## ABSTRACT

*This paper aims to find out how the crisis caused by the Covid-19 pandemic affects the policies of each country in dealing with this uncertain situation. Basically, this phenomenon has caused a global effect for all sectors of human life, especially socio-culture, politics, health, education, security and the most important thing in this discussion is the economy. The dynamics of the international economy in the Covid-19 era in general can be said to have experienced a very drastic decline until it touched a steeper point compared to previous crises. Departing from this fact, there are many obstacles as well as very large inequality or complex heterogeneity that is felt by the entire international community. That is, amid the current uncertainty, an international response is absolutely necessary in order to maintain the stability of the international world. Collaboration between nation-states is considered as one of the international responses that has a positive impact and is quite capable of overcoming economic problems in various parts of the world, one of which is South-south Cooperation. To find out more about this, we obtained data from various sources, including news, research reports, journals, and websites. By using qualitative methods and a literature review approach to answer big questions related to the potential and challenges that will result from international collaboration or international cooperation from an economic perspective.*

*Keywords: Economy Pasca Pandemic, International Respons, International Collaboration, SSC (South-South Cooperation)*

## PENDAHULUAN

Masih dengan situasi serupa, pandemi sedemikian rupa menjadikan dunia internasional dalam kondisi jenuh dalam ketidakpastian, tiap-tiap negara berusaha mendapatkan solusi dari segala ketimpangan yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 dan mulai menetapkan politik luar negeri atau kebijakan luar negeri masing-masing dengan harapan Kolaborasi dan Respon dunia Internasional mampu menghentikan krisis yang tengah terjadi.

Kebijakan luar negeri adalah sebuah strategi yang dipakai negara dalam melakukan interaksi dengan negara-negara lain dengan harapan agar tujuannya dapat tercapai. kebijakan luar negeri dalam pandangan Webber dan Smith, digambarkan sebagai sebuah program maupun kebijakan-kebijakan yang berasal dari adanya usaha dalam rangka menggapai sebuah target, mengambil keputusan, serta *action* yang pemerintah sebagai perwakilan negara ambil dalam tindakannya, dan kebanyakan dilakukan dengan pihak-pihak yang berasal dari eksternal, serta adanya suatu pengendalian terhadap masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan luar (Webber and Michael 2002).

Seperti Negara-negara lainnya, Kebijakan luar negeri pada dasarnya dilakukan untuk merealisasikan *National Interest* (Kepentingan Nasional) di dalam forum internasional. Sama halnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, hal tersebut dijalankan oleh Pemerintah Indonesia melalui kebijakan *soft power Diplomacy* dengan berperan menjadi negara pemberi bantuan pada forum Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) antar sesama negara *underdeveloped* (Berkembang). Peran aktif dalam KSS ini juga menjadi politik wujud prestise bagi Indonesia di mata internasional. Kerjasama antar negara selatan-selatan atau negara berkembang ini sendiri divisualisasikan sebagai sebuah bentuk usaha untuk membangun kerjasama dalam pembangunan kepada sesama negara anggota dengan harapan mampu menciptakan negara yang mandiri dan memiliki tujuan untuk memperkuat kedudukan para negara-negara dengan status “*developing country*” dalam diskusi-diskusi skala global (A Choesn 2014).

Kerjasama yang disepakati oleh para negara anggota ini ialah sebuah kerjasama yang berfokus pada pembangunan dengan tujuan agar negara-negara yang tergabung sebagai anggota mampu menjadikan bangsa mereka sebagai bangsa yang mandiri dengan berasas pada rasa solidaritas yang diwujudkan dalam bentuk *mutual benefit* dan *mutual opportunity*. (ISSTJ 2017). Perserikatan Bangsa-bangsa mendeskripsikan Kerjasama ini sebagai sebuah proses yang telah dipilih dan dianggap baik oleh negara-negara anggota untuk mampu

mencapai kepentingan negara dan membawa negaranya ke arah yang lebih baik. Dalam prosesnya, kerjasama ini akan membawa adanya keterlibatan dari pemerintahan, organisasi-organisasi dalam batas wilayah tertentu, para kaum sipil, para pelajar, maupun keterlibatan sektor swasta, yang dalam pelaksanaannya bisa berbentuk kegiatan bertukar ilmu pengetahuan, *skill improvement*, mengembangkan potensi sumber daya, serta kecakapan teknis melalui tindakan kolektif-regional maupun interregional demi terciptanya hubungan timbal balik yang memberi keuntungan bagi semua pihak. (Digital Library UN).

Secara umum, KSS merupakan kerjasama yang melibatkan negara-negara dengan status sebagai *developing country* untuk menciptakan jalan keluar terhadap banyaknya tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat negara berkembang khususnya di bidang pembangunan. Adanya Kerjasama Selatan-Selatan ini juga diharapkan mampu membawa kerjasama ekonomi dan teknis menjadi semakin kuat antar sesama negara berkembang dengan cara mengambil kesempatan yang ada untuk saling bertukar praktik terbaik mereka dan melakukan diversifikasi dengan tujuan memperbesar pilihan pembangunan dan hubungan ekonomi mereka (CSIS 2014). Harus diakui bahwa akhir-akhir ini telah banyak terjadi perubahan dalam skala yang cukup besar dalam tatanan pembangunan internasional. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perkembangan pada negara yang bergeser ke arah pertumbuhan yang bersifat *multipolar* dimana perkembangan ini tidak lagi mengarah pada pembangunan konvensional. Kerja sama Selatan-Selatan ini saat ini telah menjadi bagian penting dalam usaha memfasilitasi dan memperkuat kerjasama-kerjasama dalam bidang pembangunan yang difokuskan pada negara-negara berkembang. Disisi lain, adanya kerjasama ini juga berperan penting sebagai media untuk saling bertukar pengalaman, pengetahuan, dan informasi (CSIS 2014).

Istilah Kerja sama Selatan-Selatan ini juga kerap kali mengilustrasikan pertukaran teknologi (*technology*), sumber daya (*resource*) dan pengetahuan (*Knowledge*) oleh para pembuat kebijakan dan dilandasi oleh rasa solidaritas, saling menguntungkan dan rasa kesetaraan. Kerja sama Selatan-Selatan pada saat ini lebih dikenal dengan sebutan Kerjasama Amerika Selatan-Afrika atau ASA. Tentunya melalui kerjasama ini baik dari pihak negara Amerika Selatan dan Afrika, keduanya memiliki ambisi yang kuat untuk memberikan tatanan dunia yang baru serta dapat menentang dominasi bidang sosial, ekonomi dan politik kubu Barat.

Dewasa ini, adanya Kerjasama Selatan-Selatan ini telah berkembang menjadi sebuah materi diskusi dalam beberapa konferensi-konferensi skala global, diantaranya diskusi

dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa , Gerakan Non-Blok (GNB), G77 China dan G20. (kemlu 2018) Hingga saat ini Kerjasama Selatan-Selatan semakin berkembang menjadi alternative kerjasama pembangunan, juga tumbuh menjadi rancangan kebijakan luar negeri negara-negara berkembang. Sejalan dengan hal tersebut, penulis merasa perlu mengetahui lebih jauh apakah Kerjasama Selatan-Selatan ini masih kompatibel dalam merespon dinamika politik, ekonomi, khususnya dalam era Pasca Covid-19. Juga terkait bagaimana Presiden dan segenap pemangku jabatan di Indonesia merespon model kerjasama ini. Maka tulisan ini akan mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada.

Berangkat dari penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, Pembahasan covid-19 sangatlah kompleks terhadap isu ekonomi. Permasalahan mengenai Ekonomi ada saat munculnya sebuah potensi ancaman yang bersinggungan langsung terhadap perekonomian suatu negara, untuk itu pemerintah diharapkan mampu menetapkan suatu kebijakan yang nyata dengan tujuan mengatasi permasalahan yang dapat mengancam perekonomian. Indonesia memiliki kepentingan yang sangat erat dalam membentuk kolaborasi dan koordinasi kebijakan antara negara-negara keanggotaan Kerjasama Selatan-Selatan dengan tujuan membuat pemulihan dan meningkatkan sistem perekonomian global yang kuat, dinamis seimbang dan berkelanjutan.

Untuk itu, selain memenuhi ketentuan dalam Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia (PNMHII) ke-33 dalam Chamber Paper Presentation, tulisan ini dibuat untuk mengetahui bagaimana respon dan tantangan Indonesia dalam mengatasi krisis yang disebabkan oleh Covid-19 terkhusus dalam Kerjasama Selatan-Selatan dalam pertumbuhan Ekonomi, serta selain itu berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat pula dirumuskan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yakni bagaimana Respon serta tantangan secara kolektif Internasional Kerjasama Selatan-Selatan di Indonesia pada Era pasca Covid-19?

### **KERANGKA ANALISIS**

Pemikir Liberalisme pada umumnya mengambil pandangan positif tentang sifat manusia yang meyakini akal pikiran manusia dan memiliki keyakinan besar terhadap asas-asas yang bersifat rasional yang mampu digunakan dalam pembahasan-pembahasan global. Disisi lain, asumsi dasar pemikir liberalisme klasik juga telah menyadari kalau manusia memiliki karakter yang egoistik atau hanya berfokus pada keuntungan sendiri, namun liberalisme meyakini bahwa manusia atau individu ini mempunyai hajat yang besar dan termasuk

kedalam tindakan sosial yang kooperatif dan kolaboratif di wilayah domestic maupun secara dunia internasional.

Teori liberalis institusional yang dimaksud oleh Prof. Robert Keohane dan Joseph Nye menyebutkan bahwasanya kemunculan pendekatan ini merupakan suatu tindakan persuasif atau dukungan supaya terciptanya negara-negara yang terus melakukan kerjasama dan agar meningkatnya stabilitas keamanan dan pengelolaan institusi internasional. Liberal institusional memandang bahwa haruslah diberi penekanan pada sistem dan instansi-instansi sebagai sebuah cara untuk menggambarkan kaitan hubungan internasional khususnya untuk membuat negara saling melakukan kesepakatan kerjasama. (Baylis 2005)

Kacamata dalam pendekatan Liberal Institusionalis dalam mengamati arus hubungan internasional mendapatkan sebuah konsep dimana negara diasumsikan memiliki peranan yang sangat krusial dalam mengamati situasi dalam kerangka internasional yang bersifat anarki, tetapi para liberalis institusionalis memiliki asumsi bahwa walaupun negara berada dalam situasi atau kondisi dunia yang anarki, kemungkinan untuk melakukan kerjasama akan selalu ada dan berjalan. Bagi liberalis institusionalis, adanya pembentukan institusi kerjasama dan rezim akan mampu membendung laju dunia yang bersifat anarki (S. Burchill 2005). Mahbubani berasumsi bahwa kerjasama antar negara akan menyebabkan *zero sum game* dapat berubah menjadi *win-win game*. (Mahbubani 2013)

Jika kebijakan Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) ini ditinjau menggunakan perspektif liberalis institusionalis, maka pada dasarnya Perspektif ini melihat bahwa semua wujud secara positif dan ketika ingin menggapai tujuan baik individu atau pun secara kolektif dapat dilakukan melalui kerjasama. Hal tersebut juga dipercaya ketika memandang negara menjadi entitas yang dapat mengadakan suatu kerjasama. Paham liberalis institusionalis berpendapat bahwasannya tujuan dari adanya kesepakatan antar negara dalam melakukan kerjasama ataupun didalam sistem dunia yang bersifat anarki agar tetap eksis, namun menurut mereka situasi dunia anarki tersebut mampu ditutupi melalui dengan membentuk rezim dan kerjasama institusional, berbeda dengan Perspektif realis yang memandang bahwa *national interest* sebagai alokasi antara *insiders* dan *outsiders*, kepentingan siapa yang diakomodasi (negara) dan kepentingan mana yang diabaikan (negara lain) (S. Burchill 2005).

Asumsi dasar Liberalis dalam memandang Kerjasama Selatan-Selatan ini adalah bahwa kerjasama yang berbentuk interdependensi atau kerjasama saling memiliki ketergantungan diantara satu dengan yang lain yang akan memberikan manfaat.

Ketergantungan di dalam politik internasional disebabkan adanya aktivitas dua arah yang terjalin diantara negara atau aktor-aktor di negara-negara. Adanya pengaruh tersebut adalah suatu cerminan terhadap munculnya suatu kesepakatan yang terjadi yakni adanya aliran uang, orang, barang, dan adanya pesan komunikasi yang mampu menembus batas-batas suatu wilayah.

Apabila perspektif liberalis institusionalis ini diletakkan dalam melihat isu KSS, keputusan dan kebijakan Indonesia dalam menunjukkan adanya *support* (dukungan) terhadap negara-negara yang masih dalam status *developing country* merupakan suatu keputusan yang bijak mengingat hal tersebut dilandasi pada fakta bahwa Indonesia telah mengadakan *mutual gains*, di mana pemberian bantuan tidak hanya sebagai bentuk pemenuhan dari National interest Indonesia namun juga sebagai bagian dari pemenuhan dari kepentingan kolektif institusi multilateral juga, di mana Indonesia menjadi anggota di dalamnya. Memberikan bantuan adalah kepentingan kolektif dari PBB juga G20<sup>1</sup>. ((Apresian 2015).

Potensi yang dapat tercipta berkat adanya KSS dengan anggota negaranya yang aktif memenuhi tujuan utama kerjasama ini merupakan suatu hal optimism terhadap hasil yang dapat diperoleh. Berbicara tentang organisasi kerjasama internasional semacam ini dapat diperhatikan melalui kaca mata Liberalisme. Liberalisme sendiri dengan ciri utamanya adalah penciptaan pemerataan hegemoni melalui institusi internasional atau organisasi internasional adalah praktik yang tepat untuk menciptakan keamanan kolektif. Kerjasama Selatan-Selatan mampu menjadi wadah yang sempurna dalam mencapai keuntungan kedua pihak melalui kerjasama bersama dalam harmonisasi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (*literature search*), disertai dengan pemaparan data yang relevan terkait dengan dinamika Hubungan internasional di era Covid-19 khususnya kerjasama ekonomi.

---

<sup>1</sup> Kerja Sama Selatan-selatan merupakan salah satu fokus Perserikatan Bangsa-bangsa dan direalisasikan dalam suatu kelembagaan bernama *United Nations Office for South-South Cooperation* “UNOSSC” sebagai entitas independen pada tahun 1975. Pada forum G20, KSSS juga menjadi salah satu fokus dari G20 dan dibentuk *Task Team on South-South Cooperation* sebagai tempat khusus untuk membahas Fenomena KSS. Dan Indonesia merupakan *Co-Chair* dalam *Task Force* ini.)

## PEMBAHASAN

### Potensi Kerjasama Selatan-Selatan dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Era Pasca Covid-19

Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) merupakan suatu unit yang disiasati oleh PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) dalam menangani masalah-masalah pembangunan pada negara-negara yang berstatus sebagai *developing country*. Kerjasama antara negara selatan-selatan ini merupakan sebuah program kerjasama yang melibatkan negara-negara berkembang dengan tujuan agar negara anggota mampu menggapai kemandirian bersama atas asas solidaritas, kesetaraan atau *mutual opportunity* dan saling memberikan keuntungan atau *mutual benefit* (State Secretariat The Republic of Indonesia 2017). Ketika melihat kerjasama ini dibentuk maka kita akan sadar bahwa negara berkembang memiliki peluangnya masing-masing untuk memiliki perubahan.

Relevansi perkembangan Kerjasama Selatan-Selatan yang termasuk dalam kerangka *monitoring and evaluation* ini dapat dilihat dari bagaimana tahapan sejarah perkembangan dari KSS dalam usahanya untuk mewujudkan solidaritas dan penguatan *active collection* yang menunjukkan bahwa adanya kesesuaian kerjasama yang terjalin dengan prioritas kebijakan pembangunan dan kepentingan nasional daripada pihak-pihak yang terkait.

Selain itu, KSS ini juga dipandang relevan karena dapat menjadi suatu siasat untuk meningkatkan kesejahteraan global secara menyeluruh dengan mencerminkan prinsip *win-win solution*. Meski demikian, Kerjasama Selatan-Selatan ini dalam pengevaluasian bentuk relevansinya masih membutuhkan pembelaan atau advokasi yang lebih lanjut. Kerjasama Selatan-Selatan ini pun terbilang relevan untuk terus dikembangkan karena dapat memberikan *impact* yang baik dalam berbagai aspek suatu negara, seperti aspek perekonomian dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan perdagangan nasional sesama negara berkembang. Aspek sosial budaya dalam meningkatkan kapasitas dan citra Pascaif dari budaya suatu negara, serta pada aspek politik yang dapat mendorong terciptanya tatanan dunia yang aman dan tertib sehingga memberikan dampak yang baik pada stabilitas keamanan nasional.

Selain itu, bantuan melalui KSS ini bertujuan agar negara-negara dunia ketiga atau negara berkembang diharap mampu untuk selalu saling membantu dan mengurangi *dependency* (Ketergantungan) kepada negara maju dalam mengejar ketertinggalannya, utamanya diantara Rivalitas China dan juga Amerika Serikat, selain itu bantuan-bantuan

yang diberikan oleh negara-negara *Developed* (Maju) saat ini cenderung mengalami *Aid Fatigue* (kejujenuhan). *Aid Fatigue* sendiri adalah suatu bentuk kausalitas dari berakhirnya bipolar sistem dan Perang Dingin, kekuatan ekonomi yang didistribusikan kembali kepada negara-negara, kesulitannya membangun *balance of payment* dan ketidak-setujuan dalam negeri. Hal ini membuat negara-negara maju tidak lagi menjadikan bantuan luar negeri sebagai suatu prioritas utama. Hal ini merujuk kepada lambatnya negara maju maupun badan donor dalam menanggapi kesulitan yang dihadapi oleh negara berkembang. (Chandra 2019)

Jika merujuk pada rivalitas diantara negara Amerika Serikat dan China tidak dapat disimpulkan dengan cara tunggal, hal ini disebabkan karena pertentangan diantara kedua negara adidaya tersebut tidak hanya mencakup hal *security* atau keamanan saja, melainkan rivalitas yang terjadi diantara kedua negara tersebut juga mencakup aspek lainnya yang salah satunya ialah aspek perekonomian. Lantas apakah Kerjasama Selatan-Selatan ini mampu menciptakan interdependensi baru oleh sesama negara *middle-power and small power* diantara isu rivalitas yang sedang terjadi diantara negara Amerika Serikat dan juga China? Jawaban terkait pertanyaan tersebut yakni Kerjasama Selatan-Selatan bisa menciptakan interdependensi baru bersama negara-negara *middle-power and small power*. Hal ini dikarenakan negara-negara tersebut saling membutuhkan atau adanya ketergantungan antara satu negara dan juga negara lain yang disebabkan oleh perkembangan proses modernisasi yang semakin maju. Meskipun negara-negara yang dimaksud merupakan negara yang tergolong kedalam negara *middle power* dan bahkan *small power*. Namun, negara-negara tersebut memiliki pengaruh yang besar serta keunggulan dalam turut serta mengambil peran dalam rivalitas yang terjadi diantara Amerika Serikat dan Cina saat ini.

Kerjasama Selatan-Selatan ini tentu saja dapat mendorong pembangunan bersama dari sudut perekonomian, sosial budaya dan juga dari aspek politik keamanan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa relevansi dari perkembangan KSS ini dapat membawa *impact* yang baik untuk negara-negara yang turut berkontribusi didalamnya. Dari sudut perekonomian, Kerjasama Selatan-Selatan ini membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan perdagangan, akses pasar dan investasi negara yang bersangkutan, kemudian juga dapat menjadi sarana diplomasi ekonomi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional suatu negara.



Dari sudut sosial budaya, maka Kerjasama Selatan-Selatan ini dapat meningkatkan kapasitas pihak-pihak yang terlibat khususnya Indonesia dalam program melalui pertukaran pengetahuan serta dapat memperkenalkan budaya-budaya serta nilai-nilai luhur bangsa Indonesia pada negara lain yang terlibat dalam kerjasama, kemudian juga bisa menjadi sarana peningkatan citra budaya negara Indonesia di kancah internasional sebagai negara yang mampu untuk berkontribusi aktif yang berlandaskan prinsip solidaritas dan yang terakhir juga dapat menciptakan relasi yang baik antar *people to people* agar saling mengenal dan saling memahami budaya masing-masing masyarakat. Dari sudut pandang politik dan keamanan, maka dapat dilihat bahwa Kerjasama Selatan-Selatan ini mampu menjadi sarana diplomasi politik suatu negara dalam ranah global yang dapat memberikan dampak pada pertahanan keamanan negara serta mampu mendorong terciptanya keamanan nasional sebagai dampak positif dari adanya struktur dunia yang aman.

### **Wujud-wujud dan Manfaat Kerjasama Selatan-Selatan**

Berbicara tentang relevankah KSS di masa kini merupakan pembahasan yang terstruktur dan jelas. KSS masih memiliki relevansi untuk diterapkan dan dijalankan di masa kini khususnya di masa Pasca Covid 19. Relevansinya melahirkan kesesuaian kerjasama yang dilakukan dengan memprioritaskan kebijakan pembangunan dan kepentingan dua pihak. Karena relevansinya di masa sekarang sehingga KSS melahirkan keefektifitasan yang dapat memastikan proses perencanaan bahkan memastikan dampak yang akan terjadi dalam kerjasama yang dapat tercapai dengan memberikan manfaat yang sangat maksimal bagi negara-negara yang terlibat dalam KSS.

Kesetaraan dapat terwujud bagi negara-negara KSS karena negara-negara yang menjadi anggota dibebankan kerja dalam mencapai beberapa visi dan misi KSS. Sehingga, terjadi pemerataan kinerja dan peran dengan wujud kontribusi dibarengi tanggung jawab. Oleh karena itu, tercipta manajemen bersama negara-negara anggota KSS sejak awal perencanaan hingga penuaian hasil yang menjadikan adanya kerjasama stabil serta harmonis dengan bibit solidaritas, saling percaya, dan keuntungan yang merata bagi seluruh anggota KSS. Hasil dari relevansi selanjutnya adalah inklusivitas atau mencakup seluruh unsur. Dalam menjalankan kerjasamanya, diikutsertakan beberapa pihak dalam pemenuhannya, seperti pemerintah hingga masyarakat atau dengan kata lain berprinsipkan *people-centered*.

Relevansinya di masa kini ialah negara-negara selatan atau yang berstatus sebagai negara dunia ketiga atau negara berkembang seringkali dijadikan sebagai alat eksploitasi

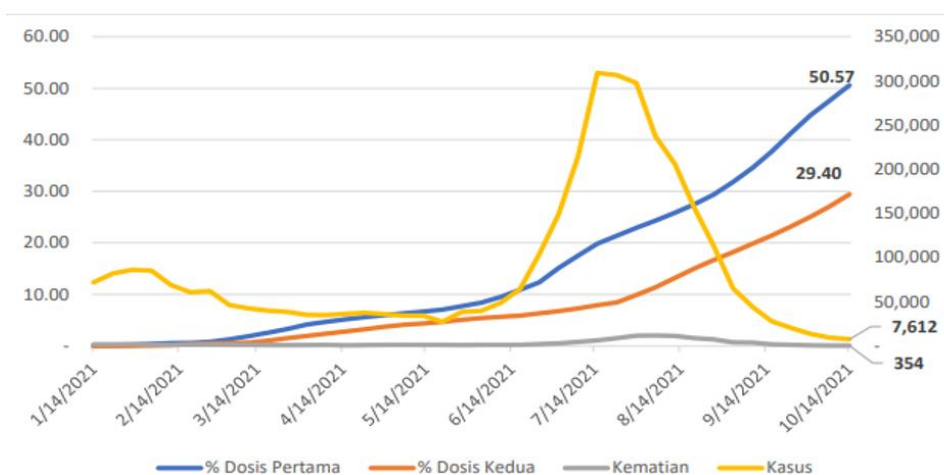
oleh negara maju dengan penerapan tariff dan monopoli ekonomi sangat tinggi serta intervensi politik yang sangat sensitif dengan dalih mendorong pemajuan pembangunan padahal tanpa disadari hal itu hanya sebuah taktik negara maju untuk mengkeruk sumber daya negara berkembang. Sehingga, pengembangan kerjasama ini apabila terus dikembangkan di era ini tentu akan menjadi senjata ampuh untuk mengurangi ketergantungan terhadap negara *great power*.

Kerjasama Selatan-Selatan ini tentu saja dapat mendorong pembangunan bersama dari sudut perekonomian, mengingat tujuan utama KSS untuk meminimalisir ketergantungan pada pihak lain (negara maju) dengan cara meningkatkan kapasitas lokal dengan sistem kerja mengupayakan negara yang terlibat untuk mampu secara mandiri dalam melaksanakan kegiatan dan proyek pemberdayaan domestik dalam rana domestik dan dilakukan untuk waktu jangka panjang (Pramadha 2019). Kebijakan KKS menjadi sangat relevan apabila kebijakan ini dilakukan pada masa pandemi sekarang, Presiden Jokowi pun juga merespon model kerjasama ini sebagai suatu peluang bagi Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara sentral jika ditinjau dari sisi ekonomi yakni Jenis-jenis bantuan ataupun kebijakan luar negeri yang diberikan Indonesia kepada negara berkembang lain secara keseluruhan bukan hanya dalam bentuk dana melainkan juga berbentuk pengiriman tenaga ahli, kemudian dengan pemberian pelatihan pengembangan kapasitas, dan pemberian alat-alat.

Prioritas utama Presiden Joko Widodo ialah meningkatkan keikutsertaan Indonesia sebagai negara *middle power* yang patut diperhitungkan di dunia (Larsasat and Natasya 2017). Hal ini tercantum dalam butir pertama Nawacita, bahwa Presiden Jokowi ingin meningkatkan peran Indonesia pada kerja sama pembangunan seperti kerja sama Selatan-Selatan dan triangular. Kilas balik ke tujuan kolektif dan individu, tujuan kolektif disini terlihat dari kepentingan Indonesia sebagai salah satu anggota G-20 yang ingin mencapai kepentingan kolektif terkait isu kesejahteraan global (Kominfo 2018). Hal ini dapat mendorong dan meningkatkan Perekonomian Nasional, sebab Indonesia mempunyai mimpi yang besar terkait kebijakan KSS ini, diharapkan KSS ini bisa menjadi *tools of diplomacy* (alat Diplomasi) terhadap *National Interest* dan juga dengan adanya kebijakan ini Indonesia diharapkan mampu memperkuat posisinya dalam lingkup politik internasional. mengapa demikian? Sebab Kerjasama pertumbuhan melalui KSS ini dapat disebut sebagai konsep hubungan internasional yang besar terhadap *National Interest*.

Poin utamanya, kerjasama ini akan diikuti oleh tidak sedikit negara berkembang yang akan belajar langsung ke Indonesia. Yang tentunya dalam proses tersebut negara-negara yang tergabung dalam KKS akan datang dan melihat langsung bagaimana wilayah-wilayah tersebut dianggap mampu berjaya dalam melakukan program kerjanya untuk meningkatkan pertumbuhan. Diharapkan proses tersebut dapat menjembatani antara kerjasama negara dan daerah.

**Gambar 1. Perbandingan kasus, kematian, dan presentase cakupan vaksin nasional**



Sumber : Ikhtisar Mingguan Covid-19, Edisi 13

[https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/laporan-mingguan-covid/Laporan-Mingguan-Penanganan-Covid-19\\_18-Okt-2021.pdf](https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/laporan-mingguan-covid/Laporan-Mingguan-Penanganan-Covid-19_18-Okt-2021.pdf)

Indonesia di bawah kepemimpinan SBY tidak hanya menjadi akhir dari peranan besar Indonesia di KSS. Pada pemerintahan Jokowi KSS menduduki kursi prioritas dengan mengedepankan aksi support politik terhadap kedaulatan negara berstatus developing country di wilayah Asia dan wilayah Afrika, peningkatan perekonomian dengan karakter berkelanjutan. Jokowi memaksimalkan peranan Indonesia melalui kontribusi nyata pembangunan global berkelanjutan dengan 780 program KSS untuk bidang pertanian, perikanan, infrastruktur, keuangan mikro, perbankan, UMKM, ekonomi, dan infrastruktur Indonesia pada saat ini mengalami kepesatan, sehingga untuk menjadi sentris dalam KSS adalah yang memungkinkan bagi Indonesia.

### Tantangan Kerjasama Selatan-Selatan Pada Era Pasca-Covid19

Di samping adanya beberapa dampak yang dapat dirasakan Sebagai effect dari adanya Kerjasama Selatan-Selatan bagi perekonomian Indonesia, nampaknya pemerintah dan segenap “Tim Sukses” dari Kerjasama Selatan-Selatan ini telah masuk kedalam level

baru yang lebih sulit dibanding tantangan pada level-level sebelumnya. Jika sebelumnya tantangan-tantangan yang dihadapi hanya sebatas pada kurangnya modal, perdagangan global, maupun tantangan yang muncul dari semakin buruknya perubahan iklim yang tidak sigap ditangani sehingga memaksa terjadinya kerjasama yang pincang. Tantangan yang dihadapi sekarang dapat dikatakan sebagai “*The Worst of The Worst*” yang telah sampai kepada titik dimana interaksi-interaksi dalam hubungan internasional benar-benar dipaksa untuk berhenti beroperasi. Inilah sebuah realita dari munculnya Pandemi Virus Corona (Covid-19) sebagai tantangan yang dihadapi masyarakat internasional 1-2 tahun belakangan ini. Namun adanya Covid-19 tidak hanya semata-mata menggeser tantangan-tantangan yang ada sebelumnya. Justru ísemua tantangan-tantangan lama tersebut tetap ada dan bahkan bermutasi kedalam bentuk yang lebih buruk, dikarenakan adanya pandemi virus covid-19 ini. Berangkat dari situasi pandemi seperti saat ini, Penulis akan lebih berfokus pada tantangan berupa kurangnya modal dihadapi negara-negara anggota Kerjasama Selatan-Selatan serta bagaimana korelasinya dengan masa Pandemi Covid-19 saat ini.

Tantangan yang dihadapi negara anggota Kerjasama Selatan-Selatan ini adalah kurangnya modal yang menjadi senjata utama dalam melakukan kerjasama karena para anggota kerjasama ini merupakan negara-negara dengan status “*Developing Country*” atau negara-negara yang masih dalam proses berkembang. Indonesia sendiri memiliki kendala pada kurangnya sumber modal. Indonesia dalam keanggotaannya pada Kerjasama Selatan-Selatan diketahui memang sangat aktif dalam memberikan bantuan kepada negara-negara anggota lain yang masih belum berkembang atau memiliki rate pertumbuhan ekonomi yang rendah. Indonesia memberikan fokus bantuan ke wilayah Pasifik selatan, Asia, dan Afrika berupa bantuan *Good government*, bantuan Unit Kegiatan Masyarakat, serta bantuan-bantuan pelatihan di beberapa bidang seperti perikanan dan pertanian. Namun, walaupun aktif dalam berbagai bantuan dan program-program kerjasama, pada tahun 2010 Indonesia tercatat baru mengalokasikan dana sebesar 10 Juta US\$ yang mana masih tertinggal jauh dibanding dengan alokasi dana dari negara China, India, Brazil, serta Afrika selatan yang mampu menggelontorkan dana sebesar 2 Miliar dollar, 649 Juta dollar, 500 Juta dollar, dan 118 Juta dollar per-tahun 2010 (Pujayanti 2015).

Disisi Lain, sejak tahun 1981 Indonesia mulai aktif berperan dalam Kerjasama Selatan-Selatan khususnya dengan pengesahan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST). KSST ini sendiri digambarkan sebagai suatu sistem kerjasama yang bertujuan untuk

memberikan kesempatan kepada negara-negara dengan status “*Developing Country*” agar mampu mewujudkan pembangunan di negara mereka. Indonesia juga menunjukkan komitmen yang kuat dengan memasukkan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) ini kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Namun, adanya KSST ini nampaknya memunculkan dilema baru dalam dimana kurangnya modal menjadi penghambat utama dari KSST ini. Hambatan ini muncul dikarenakan negara-negara anggota yang tergabung masih merupakan negara berkembang sehingga modal yang dipersiapkan negara anggota untuk mengoperasikan KSST ini juga sangat terbatas. Ditambah lagi dengan munculnya gelombang Pandemi Virus Corona yang menghantam dunia 1-2 tahun belakangan ini membuat negara dipersulit pergerakannya sehingga menyebabkan mereka semakin kesulitan menemukan pendapatan dan sumber modal.

Terlepas status Indonesia dalam kesepakatan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular yang sekarang telah berada pada status “*Middle Income Country*” atau MIC yang pada akhirnya berhasil menjadikan Indonesia sebagai *New Emerging Donors* yang mengubah status Indonesia di mana Indonesia sekarang juga telah mampu untuk menjadi negara pemberi bantuan dari yang dahulu hanya menjadi negara penerima bantuan, adanya pandemi Virus Corona ini diperkirakan akan mempengaruhi jumlah bantuan yang dikirim Indonesia ke negara-negara Penerima bantuan. Prakiraan ini sejalan dengan menurunnya perekonomian Indonesia pada tahun ini.

Dalam laporan Bank Dunia tahun ini (2021), Indonesia diklasifikasikan sebagai negara dengan pendapatan ekonomi rendah atau *lower middle income* setelah pada tahun 2020 lalu berada pada klasifikasi *upper middle income* dengan GNI (Gross National Income) sebesar 4.049 US\$ per kapita. Pada tahun ini, Gross Nasional Info atau Pendapatan Bruto Nasional Indonesia mengalami penurunan menjadi 3.979 US\$ per kapita. Dody Budi Waluyo selaku pemegang jabatan Deputy Gubernur di Bank Indonesia menjelaskan bahwa adanya gelombang pandemi covid-19 lah yang menjadi alasan utama menurunnya pertumbuhan perekonomian Indonesia sehingga harus turun level ke *lower middle income*. Bapak Dody Waluyo melanjutkan bahwa penurunan perekonomian ini tidak hanya terjadi pada kelompok negara berkembang, namun juga dialami oleh para kelompok negara-negara maju. Untuk Proses pengklasifikasiannya sendiri, Bank Dunia menerapkan penerapan level threshold di level-level tertentu.

Pandemi covid-19 ini memberikan pengaruh yang tinggi terhadap laju perekonomian banyak negara yang tidak semata-mata hanya berdampak kepada negara emerging market

seperti Indonesia saja tetapi juga sampai ke negara-negara berpendapatan relatif tinggi dan maju. Meratanya pengaruh pandemi covid-19 ke seluruh negara ini mengakibatkan Bank Dunia harus melihat secara relatif proses pengklasifikasiannya. Jika dilihat dari turun kelasnya status ekonomi Indonesia dari tahun lalu yang berada pada level *upper middle income* sekarang turun level menjadi *lower middle income* akibat pandemi ini dapat dipahami akan mempengaruhi proses kerjasama dalam Kerjasama Selatan-Selatan dikarenakan adanya penurunan ekonomi yang dihadapi negara-negara saat ini tentunya akan mengakibatkan kurangnya modal negara-negara anggota dalam melakukan kerjasama ini. Semakin susah dan berkurangnya modal ini akan semakin menyebabkan pengaruh buruk dikarenakan negara anggota Kerjasama Selatan-Selatan sebagian besar merupakan negara berkembang atau “*developing country*” yang memang pada dasarnya akan mengalami kekurangan modal akibat perekonomian yang belum maju.

## **KESIMPULAN**

KSS adalah kerjasama Internasional yang masih eksis diterapkan hingga saat ini dikarenakan kemampuan interdependensinya untuk mengurangi dependensi terhadap negara maju sebagai bentuk optimis terhadap kemampuan domestik serta mengurangi intervensi atas rivalitas antara Amerika dan China, melalui pembangunan berkelanjutan diberbagai bidang yang jika dilihat dari perspektif Liberalisme akan menghasilkan kerjasama yang harmonis untuk menekan konflik dan memperkuat kesetaraan hegemoni yang seimbang. Di Indonesia KSS telah menduduki kursi prioritas, oleh karena itu Indonesia jika terus memperlihatkan prestasi dan kedermawaannya terhadap KSS maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi negara sentries.

Dewasa ini Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) telah menjadi salah satu kajian yang banyak dibahas di pertemuan-pertemuan skala global, misalnya saja pada pertemuan PBB, Gerakan Non-Blok (GNB), G77 China dan G20. Hingga sampai sekarang Kerjasama Selatan-Selatan semakin berkembang menjadi alternative kerjasama pembangunan, juga telah berkembang menjadi agenda wajib kebijakan luar negeri negara-negara berkembang.

Negara-negara selatan atau yang berstatus sebagai negara dunia ketiga atau negara berkembang seringkali dijadikan sebagai alat eksploitasi oleh negara maju dengan penerapan tariff dan monopoli ekonomi sangat tinggi serta intervensi politik yang sangat sensitif dengan dalih mendorong pemajuan pembangunan padahal tanpa disadari hal itu hanya sebuah taktik negara maju untuk mengkeruk sumber daya negara berkembang. Sehingga,

pengembangan kerjasama ini apabila terus dikembangkan di era ini tentu akan menjadi senjata ampuh untuk mengurangi ketergantungan terhadap negara *great power*.

Kerjasama Selatan-Selatan merupakan sebuah wadah yang kuat dalam menciptakan kerja sama baru juga menciptakan terbentuknya sifat yang saling ketergantungan satu sama lain dan menciptakan bentuk saling ketergantungan serta sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan setara. Karena dalam prosesnya terdapat kepentingan dua arah yang terjadi antar negara anggota dalam skala internasional, regional, dan bahkan negara. Kerjasama antar negara selatan-selatan ini merupakan suatu proses historis dengan karakteristiknya yang sangat unik, dimana sangat sering ditemui para negara penyedia bantuan juga merupakan aktor atau negara yang menerima bantuan. Adanya hal semacam ini dapat dimaknai bahwa dukungan yang diberikan negara Selatan-Selatan mencerminkan sebuah rasa solidaritas penyesuaian dengan konteks dan kemampuan domestik, serta memajukan adanya manfaat diua arah dan hasil ‘win-win’ dalam kemitraan yang sama (CSIS 2014).

Sehingga penulis percaya bahwa KSS dapat menjadi sarana yang kuat dalam membangun kerja sama juga menciptakan bentuk saling ketergantungan antara negara-negara *middle power* dan *small power*. Dan Indonesia bisa saja mampu karena Indonesia pun juga memiliki kapabilitas-kapabilitas kekuatan yang tentunya juga dibutuhkan oleh negara lain dalam pemenuhan kepentingan nasionalnya seperti pada bidang pembangunan, tata Kelola pemerintahan dan bidang ekonomi. Disamping itu, Indonesia juga diungguli oleh letak geografisnya dan karena kebijakan Kerja sama Selatan-Selatan juga menjadi elemen soft power diplomacy yang diharapkan dapat mempererat pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

Namun sayangnya dalam melaksanakan kerjasama Kerjasama Selatan-Selatan ini dalam pengevaluasian bentuk relevansinya masih benar-benar membutuhkan pembelaan atau advokasi yang lebih lanjut, sebab Covid-19 tidak hanya semata-mata menggeser tantangan-tantangan yang ada sebelumnya. Justru semua tantangan-tantangan lama tersebut tetap ada dan bahkan bermutasi kedalam bentuk yang lebih buruk, dikarenakan adanya pandemi covid-19 ini. Selain itu terdapat tantangan atau risiko yang bisa terjadi apabila negara yang bekerja sama mengalami *misspreception*. Tidak mudah untuk melakukan kerja sama dengan negara lain, dibutuhkan rasa saling percaya dan rasa saling menghargai, terutama memiliki tujuan yang sama yang ingin dicapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Choesn, T. (2014). Kebijakan Kerja sama Pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia. Tb. A Choesni., FGD P3DI dengan Direktorat.
- Apresian, S. R. (2015). Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Sebagai Instrumen Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Global. *Universitas Katolik Parahyangan*, p. 193.
- Baylis, J. &. (2005). *The Globalization of World Politics*. Oxford: Oxford University Press.
- Boediono. (2012, Juli 10). *Negara Selatan-selatan Harus Siap Hadapi Tantangan*. Retrieved Juni 28, 2021, from <http://finance.detik.Com/read/2012/07/10/130754/1961963/4/1/boediono--negara-selatan-selatan-harus-siap-hadapi-tantangan>
- Burchill, S. (2005). *The National Interest in International Relations Theory*. new York: Palgrave Macmillan.
- Burchill, S. (2005). *The National Interest in International Relations Theory*, Palgrave Macmillan. Newyork.
- Chandra, P. (2019). Theory: Lessons from Sub-Saharan Africa. *Stanford Journal of International Relations*, Vol. XI No. 1.
- CSIS. (2014). *Studi mengenai Implementasi Kebijakan dan Strategi Kemitraan Pendanaan Ke~a sama Selatan-Selatan dan Triangular*,. Jakarta: CSIS.
- DPRI. (2004). *undang-undang Nomor 32 tahun 2004*. Retrieved from <https://www.dpr.go.id>
- Fitriani, R. D. (2018, April 22). *Kerja Sama Selatan-selatan : Solidaritas Mewujudkan Kemandirian*. Retrieved Juni 28, 2021, from <https://m.kumparan.com/rd-fitriani/kerja-sama-selatan-selatan-solidaritas-mewujudkan-kemandirian>
- ISSTJ. (2017, Maret 20). *KerjaSelatan-Selatan dan Triangular Indonesia* . Retrieved Juni 29, 2021, from [http://digitallibrary.un.org/record/826679/files/SSC\\_19\\_3-EN.pdf](http://isstj.setneg.go.id:isstj.setneg.go.id: http://digitallibrary.un.org/record/826679/files/SSC_19_3-EN.pdf)
- KEMENKES. (2021, Oktober 18). *Kementerian Kesehatan RI*. Retrieved Oktober 27, 2021, from [https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/laporan-mingguan-covid/Laporan-Mingguan-Penanganan-Covid-19\\_18-Okt-2021.pdf](https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/laporan-mingguan-covid/Laporan-Mingguan-Penanganan-Covid-19_18-Okt-2021.pdf)
- kemlu. (2018, Mei 1). *Kebijakan Kerjasama Multilateral*. Retrieved Juni 29, 2021, from <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/default.aspx>
- Kominfo. (2018, Agustus 18). *Jadikan Indonesia Mandiri, Berkepribadian, dan Berdaulat*. Retrieved Juni 29, 2021, from <https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/5629/NAWACITA%3A+9+Program+Perubahan+Untuk+Indonesia/0/infografis>
- Larsasat, C., & Natasya, E. d. (2017). Peran Indonesia di G-20: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Hubungan Internasional* , 43.
- Mahbubani, K. (2013). *The Great Convergence*. New York: Public Affairs.
- Pramadha, R. A. (2019, November). *researchgate*. Retrieved Juni 27, 2021, from Menaker Relevansi Kerja Sama Selatan-selatan dengan Kebijakan Nasional Indonesia : Sebuah Kerangka Monitoring dan Evaluasi.
- Pujayanti, A. (2015). Kerjasama Selatan-selatan dan manfaatnya bagi Indonesia. *Politica Vol. 6 No. 1 Maret*, p.66.
- State Secretariat The Republic of Indonesia. (2017, Maret 20). *Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia*. Retrieved Juni 27, 2021, from <https://isstc.setneg.go.id/index.php/component/content/article/7-newsletter/219-kerja-sama-selatan-selatan-dan-triangular-indonesia>



- Tra, H. (2020, April 14). *Vov World*. Retrieved Oktober 27, 2021, from <https://vovworld.vn/id-ID/berita/indonesia-mengapresiasi-vietnam-dalam-upaya-bersamasama-dengan-asean-melawan-covid19-848126.vov>
- UN. (UN. Secretary-General, Framework of operational guidelines on United Nations support to South-South and triangular cooperation : note / by the Secretary-General, High-Level Committee on South-South Cooperation, 2016, New York, hlm. 5. diakses dalam <http://>, Maret 14). Retrieved Juni 29, 2021, from Digital Library UN: [http://digitallibrary.un.org/record/826679/files/SSC\\_19\\_3-EN.pdf](http://digitallibrary.un.org/record/826679/files/SSC_19_3-EN.pdf)
- Webber, M., & M. S. (2002). *Foreign Policy in Transformed World*. London: Prentice Hall.